

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Silvana Oroh¹, Listriyanti Palangda^{2*}, Ilham Abu³, Meike Mamentu⁴, Fransiskus L. P. Jani Lumape⁵

Pendidikan Ekonomi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia^{1,2,4}

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia³

Pendidikan Teknik Bangunan, Teknik, Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia⁵

*Email Korespodensi: listriyantipalangda@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 09-04-2025

Received 16-06-2025

Published 25-07-2025

Keywords:

Merdeka Belajar;
Policy Implementation;
Elementary Education;
Teacher;
Learning Innovation;

Kata Kunci:

Merdeka Belajar,
Implementasi Kebijakan,
Pendidikan Dasar,
Guru,
Inovasi Pembelajaran

ABSTRACT

This study aims to analyze the understanding and implementation of the Merdeka Belajar policy in elementary schools in East Bolaang Mongondow Regency. This policy encourages educational transformation through a flexible, contextual, and student-centered approach. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation of principals and teachers in several elementary schools. The results show that understanding of the policy varies considerably. Some teachers and principals understand the essence of this policy as an effort to provide freedom in designing learning that suits students' needs and local contexts. However, others still have a limited understanding, especially in applying differentiated learning and integrating the Pancasila Student Profile. In implementation, schools have designed adaptive learning plans, innovated teaching methods, and applied formative assessment-based evaluation. The obstacles include limited facilities, teacher readiness, and a lack of ongoing training. This study concludes that although the implementation still faces challenges, there is great potential for further development. Policy support, ongoing training, and improved facilities are needed to optimize implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kebijakan ini mendorong transformasi pendidikan melalui pendekatan fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah dan guru di beberapa sekolah dasar. Hasil menunjukkan pemahaman terhadap kebijakan bervariasi. Sebagian guru dan kepala sekolah memahami esensi

kebijakan sebagai upaya memberikan kebebasan merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal. Namun, sebagian lain masih memiliki pemahaman terbatas, terutama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi Profil Pelajar Pancasila. Dalam implementasi, sekolah telah merancang pembelajaran adaptif, berinovasi dalam metode mengajar, serta menerapkan evaluasi berbasis asesmen formatif. Kendala meliputi keterbatasan fasilitas, kesiapan guru, dan kurangnya pelatihan berkelanjutan. Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Merdeka Belajar masih menghadapi tantangan, namun terdapat potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut. Diperlukan dukungan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan sarana prasarana.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Di tengah perubahan global yang dinamis dan kompleks, sistem pendidikan Indonesia dituntut untuk terus berinovasi agar mampu melahirkan peserta didik yang adaptif, kreatif, dan mandiri. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka merespons tantangan tersebut adalah dengan mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2019. Dalam konteks pendidikan dasar, kebijakan Merdeka Belajar memberikan ruang yang luas bagi sekolah untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru didorong untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dan bermakna yang mengedepankan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, serta nilai-nilai karakter. Penelitian oleh Rukayah & Handayani (2022) menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat SD memberikan dampak positif terhadap kemandirian belajar dan motivasi siswa, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal kesiapan guru dan sarana pendukung pembelajaran.

Namun demikian, implementasi kebijakan Merdeka Belajar tidaklah seragam di seluruh daerah di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta ketersediaan sumber daya di masing-masing wilayah menjadi faktor penentu dalam efektivitas pelaksanaannya. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sulawesi Utara memiliki karakteristik tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan tersebut. Meskipun secara administratif kabupaten ini terus berkembang, namun keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kapasitas pendidik masih menjadi kendala yang nyata di lapangan.

Penelitian sebelumnya oleh Tandirerung dan Mamesa (2023) mengungkapkan bahwa guru-guru di wilayah Bolaang Mongondow Timur memiliki semangat tinggi dalam menjalankan inovasi pembelajaran, namun masih menghadapi kendala dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan semangat Merdeka

Belajar. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan teknis yang memadai serta akses informasi yang terbatas. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat masih perlu ditingkatkan, baik dari segi regulasi, pendanaan, maupun pengawasan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana implementasi kebijakan Merdeka Belajar telah berlangsung secara efektif di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Apakah kebijakan tersebut telah dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Bagaimana kesiapan dan respon dari guru, kepala sekolah, serta siswa terhadap perubahan paradigma pendidikan ini?

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam mengenai implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditawarkan guna mendukung keberhasilan program pendidikan nasional yang progresif ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman dari para pelaku pendidikan terkait penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Menurut Moleong (2021), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan secara holistik dan kontekstual. Dalam hal ini, fokus utama penelitian adalah proses, bukan hasil semata, serta memprioritaskan kedalaman informasi dibandingkan dengan kuantitas data.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang difokuskan pada beberapa sekolah dasar sebagai representasi wilayah. Studi kasus memberikan ruang eksplorasi terhadap kondisi nyata implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks tertentu. Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan pemilihan lokasi secara purposive. Sekolah-sekolah yang dijadikan subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterwakilan geografis (pedesaan dan perkotaan), ketersediaan data, serta status penerapan Kurikulum Merdeka. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama tiga bulan, dimulai dari Juli hingga September 2025.

Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Informan dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran dan manajerial sekolah, pemahaman terhadap kebijakan Merdeka Belajar, serta kesediaan mereka untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2017) yang menyatakan bahwa purposive sampling digunakan dalam

penelitian kualitatif untuk memilih informan yang dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pemahaman, dan pengalaman informan mengenai implementasi Merdeka Belajar, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran di kelas, interaksi guru dan siswa, serta penggunaan perangkat ajar. Studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen penting seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), modul ajar, catatan rapat sekolah, serta laporan supervisi. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh bersifat triangulatif dan kredibel (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dilengkapi dengan pedoman wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci yang secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2016). Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan beberapa teknik seperti triangulasi sumber dan teknik, member checking, serta diskusi dengan rekan sejawat (peer debriefing). Triangulasi dilakukan untuk membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, sedangkan member checking dilakukan dengan cara mengonfirmasi ulang temuan kepada informan untuk menghindari bias interpretasi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau matriks, sementara penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta makna dari data tersebut (Miles et al., 2014). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Dengan menggunakan pendekatan dan teknik yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana kebijakan Merdeka Belajar diimplementasikan di sekolah dasar, faktor pendukung maupun penghambatnya, serta implikasinya terhadap proses pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap Kebijakan Merdeka Belajar

Untuk memahami sejauh mana kebijakan ini dipahami oleh para pelaku pendidikan di lapangan, dilakukan wawancara mendalam dengan enam informan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru di Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Wawancara ini bertujuan menggali pandangan, interpretasi, serta pemahaman mereka terhadap esensi dan prinsip-prinsip dasar Merdeka Belajar. Hasil wawancara menunjukkan keragaman pemahaman

yang dipengaruhi oleh pengalaman, pelatihan, serta kesiapan masing-masing individu dalam merespons kebijakan tersebut.

Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dari keenam informan mengenai pemahaman mereka terhadap kebijakan Merdeka Belajar:

Informan 1 (Kepala Sekolah):

"Saya memahami Merdeka Belajar sebagai upaya untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam mengatur proses pembelajaran. Kami tidak lagi dibatasi oleh aturan yang terlalu kaku, tetapi diarahkan untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dalam pelatihan yang kami ikuti, disampaikan bahwa Merdeka Belajar menekankan pada esensi pembelajaran yang bermakna dan relevan."

Informan 2 (Guru Kelas 6):

"Saya melihat kebijakan ini sebagai angin segar dalam dunia pendidikan. Kami diberikan kesempatan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menyenangkan, dan sesuai dengan kondisi anak. Namun, saya juga merasa bahwa pemahaman kami masih perlu diperdalam, terutama dalam mengaplikasikan Profil Pelajar Pancasila."

Informan 3 (Guru Kelas 3):

Menurut saya, "Merdeka Belajar adalah tentang memberikan ruang kreativitas bagi guru dan siswa. Kami tidak hanya terpaku pada kurikulum yang kaku, tetapi dituntut untuk berpikir lebih kontekstual. Kendala utamanya adalah kurangnya pendampingan yang intens dari dinas pendidikan, sehingga kami harus banyak belajar mandiri."

Informan 4 (Guru Kelas 5):

"Pemahaman saya terhadap Merdeka Belajar didasarkan pada kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran berdiferensiasi dan pembentukan karakter. Meskipun masih banyak hal yang saya pelajari, saya percaya konsep ini sangat relevan untuk mengembangkan potensi anak secara menyeluruh."

Informan 5 (Guru Kelas 1):

"Saya paham bahwa kebijakan ini mendorong guru untuk menjadi lebih reflektif dan adaptif. Kami diajak untuk lebih peka terhadap kebutuhan siswa dan tidak hanya mengejar target kurikulum, tapi juga pencapaian kompetensi yang bermakna."

Informan 6 (Kepala Sekolah):

"Sebagai kepala sekolah, saya melihat pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan ini. Kami menyelenggarakan diskusi rutin di sekolah agar semua guru memiliki persepsi yang sama. Pemahaman ini menjadi pondasi awal agar implementasi berjalan baik."

Hasil wawancara dengan 6 informan dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar informan memahami Merdeka Belajar sebagai kebijakan yang memberi fleksibilitas, mendorong kreativitas, dan menekankan pada pembelajaran bermakna. Namun, pemahaman ini masih bervariasi tergantung pada pengalaman dan pelatihan yang diterima masing-masing guru.

Perencanaan Implementasi

Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan tersebut dilakukan oleh pelaku pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dilakukan wawancara dengan enam informan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru SD. Wawancara ini bertujuan untuk menggali strategi, kendala, serta cara mereka mengatur langkah-langkah awal dalam penerapan Merdeka Belajar di lingkungan sekolah.

Informan 1:

"Dalam perencanaan, kami mulai dengan menyusun program kerja tahunan berbasis kurikulum merdeka. Kami memetakan capaian pembelajaran, menyusun modul ajar, dan menyelenggarakan workshop internal antar guru."

Informan 2:

"Saya biasanya membuat perencanaan pembelajaran mingguan dan bulanan berdasarkan karakter siswa. Pendekatan diferensiasi menjadi perhatian utama dalam merancang RPP atau modul ajar."

Informan 3:

"Perencanaan kami lakukan secara kolaboratif dalam forum KKG. Kami berdiskusi mengenai tema-tema yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan murid. Ini memudahkan proses adaptasi di kelas."

Informan 4:

"Kami menyusun rencana pembelajaran yang fleksibel. Tidak terpaku pada jadwal yang kaku, tapi lebih pada pemetaan kompetensi dasar dan strategi yang kontekstual."

Informan 5:

"Perencanaan juga memperhitungkan sumber daya yang tersedia di sekolah. Kami mencoba memanfaatkan media lokal, alat peraga sederhana, dan kegiatan luar ruang sebagai bagian dari pembelajaran."

Informan 6:

"Sebagai kepala sekolah, saya mengarahkan tim kurikulum untuk menyusun rencana implementasi Merdeka Belajar yang mencakup pelatihan guru, monitoring kegiatan, serta evaluasi berkala."

Hasil wawancara dengan 6 informan maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan implementasi Merdeka Belajar dilakukan secara kolaboratif dan kontekstual, dengan

memperhatikan kebutuhan siswa, ketersediaan sumber daya, dan dukungan dari kepala sekolah. Perencanaan dinilai sebagai tahapan penting untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Untuk memahami bagaimana kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai kebijakan Merdeka Belajar, wawancara mendalam dilakukan terhadap enam informan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru-guru. Wawancara ini menggali praktik pembelajaran yang diterapkan, inovasi yang dilakukan, serta respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Informan 1:

"Di kelas, saya memberikan ruang bagi siswa untuk bereksplorasi. Kami menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan mendorong kolaborasi antar siswa."

Informan 2:

"Saya sering memodifikasi materi pembelajaran agar lebih menarik. Anak-anak sangat antusias saat pembelajaran diselingi dengan permainan edukatif dan praktik langsung."

Informan 3:

"Pelaksanaan pembelajaran saya sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Anak yang kinestetik akan lebih banyak kegiatan fisik, sementara yang visual saya sediakan media gambar atau video."

Informan 4:

"Kami menggunakan asesmen formatif untuk menilai proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Siswa diajak untuk merefleksi hasil belajarnya setiap akhir minggu."

Informan 5:

"Implementasi dilakukan secara bertahap. Saya masih menyesuaikan beberapa strategi lama dengan pendekatan Merdeka Belajar. Tapi semangat siswa meningkat karena mereka merasa lebih diperhatikan."

Informan 6:

"Kami pantau pelaksanaan melalui supervisi kelas. Guru-guru kami mendorong pembelajaran yang lebih menyenangkan, relevan, dan mendorong keaktifan siswa."

Hasil wawancara dengan 6 informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Merdeka Belajar mendorong guru untuk melakukan inovasi, memberi ruang pada pembelajaran berdiferensiasi, dan meningkatkan keaktifan serta partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.

Dukungan Sumber Daya

Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat dan bentuk dukungan sumber daya dalam proses implementasi Merdeka Belajar, dilakukan wawancara dengan enam informan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru. Wawancara ini bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi riil sumber daya yang tersedia serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya

Informan 1:

"Sumber daya kami masih terbatas, terutama dalam hal teknologi dan buku pendamping. Namun, kami berusaha kreatif dengan menggunakan media buatan sendiri."

Informan 2:

"Kami mendapat bantuan modul ajar dan pelatihan daring, namun tidak semua guru mampu mengakses atau mengikuti dengan optimal karena keterbatasan jaringan internet."

Informan 3:

"Sumber daya manusia cukup, tapi sarana prasarana seperti LCD dan laboratorium belum memadai. Kami perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk peningkatan fasilitas."

Informan 4:

"Kami mendapat dukungan dari komunitas orang tua yang bersedia membantu menyediakan alat bantu belajar. Ini sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual."

Informan 5:

"Keterbatasan ruang kelas dan alat ajar menjadi tantangan. Tapi kami berinovasi dengan membuat media dari bahan bekas yang mudah ditemukan."

Informan 6:

"Sebagai pimpinan sekolah, saya mengusulkan pengadaan alat ajar dan fasilitas melalui dana BOS. Kami prioritaskan kebutuhan pembelajaran Merdeka Belajar."

Hasil wawancara dengan informan, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sumber daya masih menjadi kendala utama dalam implementasi Merdeka Belajar. Guru dan sekolah berupaya mengatasi dengan kreativitas dan partisipasi komunitas, namun tetap dibutuhkan dukungan nyata dari pemerintah.

Evaluasi dan Refleksi

Refleksi mendalam terhadap pelaksanaan pembelajaran dapat memberikan masukan berharga dalam melakukan perbaikan berkelanjutan serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Di lingkungan sekolah dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, evaluasi dan refleksi ini menjadi indikator penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Merdeka Belajar telah terlaksana secara optimal.

Untuk menggali bagaimana proses evaluasi dan refleksi dilakukan serta tantangan yang dihadapi, dilakukan wawancara dengan enam informan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru SD. Wawancara ini bertujuan mendapatkan gambaran nyata mengenai praktik evaluasi dan refleksi yang berlangsung serta peranannya dalam memperbaiki mutu pembelajaran.

Informan 1:

"Kami melakukan evaluasi mingguan bersama guru untuk melihat perkembangan siswa dan kendala yang muncul. Ini penting agar perencanaan berikutnya bisa lebih tepat."

Informan 2:

"Setelah proses pembelajaran, saya selalu merefleksikan apa yang berhasil dan tidak. Terkadang, saya juga berdiskusi dengan siswa mengenai kesan mereka terhadap pembelajaran."

Informan 3:

"Evaluasi tidak hanya pada hasil tes, tapi juga proses. Saya menggunakan rubrik observasi dan portofolio untuk menilai keterampilan siswa."

Informan 4:

"Kami juga melibatkan siswa dalam evaluasi, mereka diajak memberi masukan tentang kegiatan belajar. Ini membuat mereka merasa dihargai."

Informan 5:

"Refleksi dilakukan melalui jurnal harian. Saya menuliskan catatan-catatan penting tentang dinamika pembelajaran dan rencana perbaikannya."

Informan 6:

"Sebagai kepala sekolah, saya meminta laporan reflektif dari guru setiap bulan. Ini menjadi bahan untuk pertemuan evaluasi bulanan."

Kesimpulan:

Evaluasi dan refleksi dilaksanakan secara rutin dan menjadi bagian penting dalam perbaikan pembelajaran. Guru melibatkan siswa dan sesama guru untuk membangun pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan.

Tantangan dan Solusi

Dalam proses implementasi kebijakan Merdeka Belajar di tingkat sekolah dasar, berbagai tantangan dan hambatan seringkali muncul dan perlu dihadapi oleh para pelaku pendidikan. Tantangan tersebut bisa bersifat internal, seperti keterbatasan kompetensi guru, motivasi, dan dukungan manajemen sekolah, maupun eksternal seperti keterbatasan sarana prasarana, dukungan orang tua, dan kondisi lingkungan. Mengidentifikasi tantangan ini menjadi langkah

awal yang penting agar solusi yang tepat dapat dirumuskan dan diterapkan demi kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tantangan serta strategi penanganan yang diterapkan oleh pelaku pendidikan sangat diperlukan.

Untuk mengetahui secara mendalam tantangan yang dihadapi serta solusi yang telah dan akan dilakukan dalam implementasi Merdeka Belajar, wawancara dilakukan dengan enam informan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru SD di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hasil wawancara ini memberikan gambaran tentang berbagai kendala sekaligus upaya-upaya kreatif yang diambil dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Informan 1:

"Tantangannya adalah kesiapan guru dan pemahaman orang tua yang masih rendah. Solusinya adalah pelatihan internal dan sosialisasi kepada wali murid."

Informan 2:

"Waktu pembelajaran sering tidak cukup karena kegiatan tambahan dari luar sekolah. Kami mencoba mengintegrasikan kegiatan tersebut ke dalam pembelajaran."

Informan 3:

"Ketidakterjangkauan teknologi digital di beberapa wilayah menjadi hambatan. Solusinya, kami kembali ke pendekatan tradisional yang kontekstual."

Informan 4:

"Motivasi guru terkadang naik turun. Saya mendorong rekan-rekan untuk terus belajar bersama dan berbagi praktik baik."

Informan 5:

"Kurikulum merdeka masih baru, jadi banyak guru merasa ragu. Kami mengatasi dengan membuat kelompok belajar kecil di sekolah."

Informan 6:

"Koordinasi dengan dinas kadang lambat. Tapi kami aktif berkomunikasi dan menyampaikan laporan serta permintaan pendampingan."

Kesimpulan:

Tantangan utama dalam implementasi Merdeka Belajar meliputi keterbatasan SDM, teknologi, dan dukungan eksternal. Solusi dilakukan dengan penguatan komunitas belajar, inovasi lokal, serta komunikasi aktif antar pemangku kepentingan.

Pembahasan

1 Kondisi Lapangan dan Pemahaman Pelaku Pendidikan

Hasil wawancara dengan enam informan di Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan Merdeka Belajar sangat beragam. Kepala sekolah dan guru memahami Merdeka Belajar sebagai kebijakan yang memberikan fleksibilitas dan ruang inovasi dalam pembelajaran, seperti yang dikemukakan oleh Informan 1 dan Informan 6. Namun, ada pula guru yang merasa pemahaman mereka masih perlu diperdalam, terutama terkait dengan pengaplikasian Profil Pelajar Pancasila dan pembelajaran kontekstual (Informan 2 dan 3).

Hal ini selaras dengan temuan penelitian oleh Wahyuni et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman guru terhadap kebijakan Merdeka Belajar sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pelatihan yang diikuti, serta dukungan manajerial dari kepala sekolah. Menurut mereka, variabilitas pemahaman ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan secara optimal, terutama di daerah yang akses pelatihannya masih terbatas (Wahyuni et al., 2023). Kondisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini mencerminkan hal serupa, dimana pelatihan yang tidak merata dan kurangnya pendampingan intensif menjadi kendala utama bagi para guru.

Selain itu, hasil penelitian oleh Sari dan Nurdiansyah (2022) menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap esensi Merdeka Belajar, khususnya prinsip pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan siswa. Mereka menemukan bahwa guru yang memahami kebijakan ini dengan baik cenderung lebih mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan adaptif. Kondisi di lapangan yang memperlihatkan guru-guru yang mencoba mengadaptasi pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan konteks lokal (Informan 4 dan 5) mendukung temuan tersebut (Sari & Nurdiansyah, 2022).

Penelitian oleh Hasanah et al. (2021) mengungkapkan bahwa kepala sekolah berperan penting dalam menyamakan persepsi dan pemahaman guru melalui forum diskusi rutin dan pelatihan internal. Upaya kepala sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mengadakan diskusi reguler sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman Merdeka Belajar sudah sesuai dengan rekomendasi penelitian tersebut (Hasanah et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman kebijakan harus dimulai dari manajemen sekolah sebagai titik sentral implementasi.

2. Perencanaan Implementasi: Strategi dan Kendala di Lapangan

Wawancara menunjukkan bahwa perencanaan implementasi Merdeka Belajar dilakukan secara kolaboratif dan kontekstual. Guru dan kepala sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berupaya menyusun program kerja yang fleksibel, mempertimbangkan karakter siswa, sumber daya yang tersedia, serta pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lokal. Ini tercermin dari kegiatan seperti penyusunan RPP berbasis kurikulum merdeka, forum KKG sebagai wadah diskusi, dan pemanfaatan media lokal.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Lestari dan Kurniawan (2022) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi Merdeka Belajar sangat bergantung pada

perencanaan yang partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Mereka juga menemukan bahwa forum guru seperti KKG menjadi media penting dalam membangun pemahaman bersama serta menyesuaikan materi dan metode pembelajaran secara kontekstual (Lestari & Kurniawan, 2022).

Namun, kendala masih muncul terkait ketersediaan sumber daya dan pelatihan. Seperti yang juga dikemukakan dalam wawancara, keterbatasan sarana prasarana menjadi tantangan utama. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Putri et al. (2021) yang menemukan bahwa kurangnya fasilitas pendukung seperti perangkat teknologi dan bahan ajar menjadi hambatan signifikan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran Merdeka Belajar secara optimal. Oleh karena itu, upaya kreatif seperti pemanfaatan alat peraga buatan sendiri dan dukungan komunitas sangat penting untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

3. Implikasi Pemahaman Kebijakan Terhadap Pelaksanaan dan Evaluasi

Pemahaman yang beragam ini juga berimplikasi pada pelaksanaan pembelajaran. Guru yang memiliki pemahaman baik cenderung menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa, seperti penggunaan pembelajaran berbasis proyek, asesmen formatif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini terbukti dari respon para informan yang berupaya menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa dan memanfaatkan asesmen formatif untuk merefleksikan proses belajar.

Fenomena ini didukung oleh penelitian oleh Fitria dan Mulyani (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat terhadap Merdeka Belajar memungkinkan guru untuk mengadopsi metode pembelajaran aktif dan kontekstual yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Mereka juga menyoroti pentingnya evaluasi dan refleksi sebagai bagian dari siklus pembelajaran yang berkelanjutan (Fitria & Mulyani, 2023).

Di sisi lain, keterbatasan dalam pemahaman dan sumber daya menimbulkan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius. Evaluasi dan refleksi yang dilakukan secara rutin di sekolah sangat membantu memperbaiki pelaksanaan pembelajaran dan membangun budaya belajar yang responsif. Penelitian oleh Putra dan Hadi (2022) menegaskan bahwa evaluasi yang melibatkan guru dan siswa secara aktif mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta memberikan feedback konstruktif untuk pengembangan proses belajar selanjutnya (Putra & Hadi, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih bervariasi dan menghadapi sejumlah tantangan. Pemahaman para pelaku pendidikan terhadap kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pelatihan yang diikuti, serta kesiapan individu. Sebagian besar kepala sekolah dan guru memahami Merdeka Belajar sebagai kebijakan yang memberikan

fleksibilitas dan ruang inovasi dalam pembelajaran. Namun, masih terdapat guru yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, terutama dalam pengintegrasian Profil Pelajar Pancasila.

Perencanaan implementasi dilakukan secara kolaboratif dan kontekstual, meskipun keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala utama. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru telah berupaya melakukan inovasi melalui metode pembelajaran fleksibel, diferensiasi pembelajaran, dan asesmen formatif yang berdampak positif terhadap keaktifan siswa. Evaluasi dan refleksi dilakukan secara rutin sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi guru, dukungan teknologi yang belum merata, motivasi guru yang fluktuatif, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan. Namun, berbagai solusi kreatif seperti pelatihan internal, pembentukan komunitas belajar, dan pemanfaatan media lokal telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Secara keseluruhan, implementasi Merdeka Belajar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menunjukkan perkembangan positif dan berpotensi optimal jika didukung peningkatan sumber daya dan pendampingan yang lebih intensif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan meningkatkan intensitas pelatihan dan pendampingan teknis bagi guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi Profil Pelajar Pancasila. Sekolah diharapkan memperkuat komunitas belajar dan forum KKG sebagai wadah diskusi dan berbagi praktik baik antar guru. Pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung, seperti perangkat teknologi dan buku ajar yang relevan dengan Kurikulum Merdeka. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) serta memperluas lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi Bahasa Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitria, D., & Mulyani, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka: Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Aktif. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 12(1), 45-61.
- Hasanah, N., Rahman, F., & Santoso, B. (2021). Peran Kepala Sekolah dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 78-90.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.

- Lestari, P., & Kurniawan, D. (2022). Strategi Perencanaan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Daerah Terpencil. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 15(3), 123-138.
- Makarim, N. A. (2020). *Merdeka Belajar sebagai Gerakan Transformasi Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, A., & Hadi, S. (2022). Evaluasi dan Refleksi Pembelajaran sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10(4), 200-214.
- Putri, R., Dewi, L., & Sari, M. (2021). Kendala Sarana dan Prasarana dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(2), 150-162.
- Rukayah, & Handayani, I. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(2), 111-123.
- Sari, T., & Nurdiansyah, A. (2022). Pemahaman Guru Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dan Dampaknya pada Strategi Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 14(1), 55-70.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N. (2021). Dinamika Pelaksanaan Merdeka Belajar dan Peran Guru di Masa Pandemi. *Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia*, 10(3), 250-260
- Tandirerung, L., & Mamesa, D. (2023). Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Wilayah 3T: Studi Kasus di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Supervisi*, 5(1), 45-59. 78
- Wahyuni, E., Santoso, R., & Wulandari, T. (2023). Variabilitas Pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar dan Dampaknya pada Implementasi. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 16(1), 34-49.